

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Hornal Kenal Ontorael¹, Debby Ch. Rotinsulu², Een N. Walewangko³
hornal.ontorael@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di unit kerja pemerintah provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu program yang diintensifkan. Karena dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran yang dimiliki oleh daerah, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dimana melalui penganggaran berbasis kinerja akan diperoleh rencana penganggaran pada tahun berikutnya yang akan didasarkan pada kinerja kerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya sehingga akan diketahui unit kerja mana yang kemampuan penganggarnya baik dan mana yang tidak baik, sehingga kinerja yang buruk dapat ditingkatkan. Dengan melihat apa saja faktor pendukung yang tidak dimiliki atau kurang sehingga dapat diperbaiki nantinya. Dalam studi ini, kita akan melihat faktor-faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini dengan mengambil tempat di dewan manajemen keuangan dan aset provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini, metode perhitungan kuadran terkecil (ordinary least square) dimana anggaran berbasis kinerja sebagai variabel dependen dan menggunakan tiga variabel independen yaitu anggaran yang digunakan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Dengan menggunakan metode pengambilan data primer atau dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan manajemen keuangan dan aset daerah. Dimana berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa anggaran, sumber daya manusia dan sistem informasi secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja, serta dengan menghitung secara individual menggunakan t-hitung juga mendapat hasil positif dan signifikan.

Kata kunci: *Anggaran berbasis kinerja, HRM, Sistem informasi, Anggaran*

ABSTRACT

The implementation of performance-based budget in the North Sulawesi provincial government work unit is one of the programs being intensified. Because it is considered more effective in improving the performance and use of the budget owned by the region, as well as increasing the transparency of local financial management. Where through performance-based budgeting will be obtained budgeting plan in the next year which will be based on work performance obtained in the previous year so it will be known which work units are good budgeting ability and which are not good, so that poor performance can be improved. By looking at what are the supporting factors that are not owned or lacking so that they can be fixed later on. In this study, we will see the factors that most influence the implementation of this performance-based budget by taking place on the financial management board and North Sulawesi provincial assets.

In this research, the method of calculating the smallest quadrant (ordinary least square) where the performance-based budget as the dependent variable and used three independent variables namely the budget used, human resources, and information systems. By using the primary data retrieval method or by using questionnaires distributed to employees of financial management and regional assets. Where based on the calculation done got the result that budget, human resources and information system together give positive and significant influence to performance-based budget, as well as by counting individually using t-count also got positive and significant result.

Keywords: *Performance-based budget, HRM, Information system, Budget*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia sejatinya dilakukan untuk dapat sampai ke tahapan perekonomian selanjutnya dimana salah satu ciri utamanya adalah pengelolaan yang serasi dan seimbang di antara satu sektor dan sektor lainnya guna memberi kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah tersebut guna meningkatkan kemandirian serta kemampuan daerah untuk dapat lebih memberi kontribusi dalam perekonomian nasional dan mencapai demokrasi ekonomi. Upaya peningkatan perekonomian suatu daerah tentu tak bisa lepas dari peran serta pemerintah pusat serta kontribusi dan peran aktif dari instansi terkait serta masyarakat luas yang secara bersama-sama mendorong peningkatan perekonomian. Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah masyarakat serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal serta membentuk lapangan kerja baru guna memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Saat ini yang masih menjadi masalah mendasar bagi pemerintah daerah adalah masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer serta bantuan dari pemerintah pusat hingga menyebabkan tingkat kemandirian daerah masih jauh dari kata memuaskan. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 Januari 2001. Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralistis ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata kepada daerah.

Hal ini tentu menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, meskipun tidak sedikit masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ini guna melaksanakan pembangunan perekonomian di daerah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan antara lain melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Transfer dari pusat, dalam era otonomi daerah seperti saat ini perlu untuk terus dipacu karena pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke daerah akan ikut diikuti oleh pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang terdapat di daerah tersebut.

Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Saragih 2003 : 82). Dalam hubungannya, antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhan anggaran belanjanya di setiap periode. Perimbangan keuangan merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari sekian banyak hubungan yang dimilikinya, hubungan ini sendiri bersifat (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pendelegasian wewenang pemerintah. Dalam prakteknya sendiri prosentase kemampuan daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun selanjutnya di sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat kecil yakni masih berada di kisaran 25% dari Total Penerimaan Daerah (TPD), hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah guna menyokong anggaran belanjanya masih ditopang sebagian besarnya oleh dana transfer pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lainnya yang sah dan telah diatur di dalam undang-undang yakni sebesar 75% persen dari Total Pendapatan Daerah (TPD). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi yang dimilikinya masih sangat terbatas karena factor ketergantungan kepada pemerintah pusat yang masih amat besar, sehingga banyak kebijakan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi sumber keuangan harus diikuti oleh pemerintah daerah, dan sumber-sumber keuangan yang potensial masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat (Yani, 2002 : 3).

Tabel 1 APBD Sulut

| TAHUN | APBD | PAD | DAU | DAK |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2010 | 1.267.944.828.194 | 418.737.660.717 | 558.781.013.000 | 17.439.200.000 |
| 2011 | 1.474.978.922.681 | 535.087.974.492 | 619.711.007.000 | 29.288.200.000 |
| 2012 | 1.834.908.287.642 | 636.650.532.712 | 790.534.491.000 | 43.539.930.000 |
| 2013 | 2.062.083.087.023 | 789.631.753.619 | 885.684.277.000 | 54.346.140.000 |
| 2014 | 2.323.127.744.359 | 929.998.888.470 | 949.852.622.000 | 59.675.060.000 |
| 2015 | 2.527.959.070.030 | 1.012.945.961.390 | 1.026.948.809.000 | 76.744.790.000 |
| 2016 | 2.885.186.111.290 | 981.044.550.490 | 1.065.545.204.000 | 712.639.625.180 |

Sumber : BPS Sulut

Dalam tabel 1.1 di atas dapat dilihat keberadaan APBD Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir, dapat diketahui bahwa secara total anggaran APBD, Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2010 hingga 2016 terus menerus mengalami pertumbuhan dan peningkatan dalam jumlah total anggaran, hal yang sama juga dapat dilihat pada angka pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya hanya pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan, hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan gambaran bahwa kemampuan provinsi Sulawesi Utara untuk membiayai kebutuhan anggaran yang dimiliki terus mengalami peningkatan yang juga ditunjukkan dengan penguatan atau peningkatan yang terus terjadi di angka pendapatan asli daerah, atau yang bisa dikatakan hasil murni dari perekonomian di daerah.

Propinsi Sulawesi Utara sebagai pintu masuk perdagangan menyadari perkembangan perekonomian yang signifikan dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Utara, tidak lepas dari peranan Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat serta sektor swasta yang melakukan investasi di kota Manado. Berbagai investasi yang dilakukan baik Pemerintah maupun swasta diharapkan kedepannya akan mampu membuka sector-sector perekonomian yang baru serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan tentu saja meningkatkan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya sumber-sumber PAD yang baru maka diharapkan kedepannya akan mampu mengurangi ketergantungan fiskal dari Pemerintah Pusat guna membiayai APBD nya sendiri, apalagi dilihat secara makro kemampuan perekonomian Kota Manado masih amat bergantung pada tingkat pertumbuhan nasional serta besarnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Didasari oleh kesadaran inilah, perhatian besar dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan faktor kemampuan daerah dalam membiayai APBDnya sendiri perlu untuk ditingkatkan guna mengurangi proporsi dana transfer pemerintah pusat dalam Total Penerimaan Daerah (TPD), yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat kemandirian suatu daerah. Dengan masih kurangnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya maka selain faktor anggaran juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola keuangan daerah, dengan adanya SDM yang mumpuni maka diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih dimaksimalkan, selain itu perlu juga adanya faktor pendukung lainnya seperti informasi untuk dapat mengembangkan kemampuan SDM serta bahan masukan dan referensi dalam mengelola keuangan daerah seefektif mungkin. Selain faktor Sumber Daya Manusia perlu juga didorong dengan adanya sistem informasi yang baik. Dengan adanya sistem informasi yang memadai maka diharapkan akan memberikan dampak kepada kinerja pegawai yang bertugas mengelola keuangan daerah. Efektivitas penyerapan anggaran belanja yang dikeluarkan oleh daerah dalam menunjang pembangunan yang dilakukan di daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja pada intinya berfokus kepada kemampuan pegawai ataupun pengelola keuangan daerah untuk menginterpretasikannya, dengan adanya keuangan daerah yang memadai sehingga menunjang dalam rencana pembangunan yang dirancang, adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan serta adanya sistem informasi yang memadai. Dengan ditunjang oleh beberapa faktor diatas diharapkan akan mampu menunjang efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja yang saat ini tengah digalakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

RUMUSAN MASALAH

Tujuan utama dari pelaksanaan Otonomi Daerah, adalah untuk membagi beban serta tanggung jawab di daerah yang bersangkutan, agar jalannya pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang lebih terfokus karena pemerintah di daerah tentu lebih mengetahui permasalahan serta kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Disamping itu Daerah juga dituntut untuk dapat mengelola serta mengurus anggaran rumah tangganya sendiri. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti guna melihat apakah kemampuan fiskal di daerah lebih berkembang selama Otonomi daerah, atau masih tetap mengandalkan kontribusi fiskal dari Pemerintah pusat untuk menjalankan Pemerintahan di Daerah. Guna mencapai hal tersebut maka perlu ditunjang dengan berbagai komponen penting diantaranya anggaran yang memadai, sumber daya manusia handal yang dapat mengelola serta melaksanakan pengalokasian anggaran keuangan di daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah, selain itu juga perlu adanya topangan sistem informasi yang memadai baik dari internal maupun external untuk dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan di daerah, untuk itu menarik dalam melihat bagaimana peranan anggaran, sumber daya manusia serta sistem informasi terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja di badan pengelola keuangan dan aset daerah propinsi Sulawesi Utara ?

Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, untuk melihat bagaimana kinerja badan pengelola keuangan dan aset daerah pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan efektivitas anggaran berbasis kinerja.

Manfaat Penelitian

- Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui perkembangan perekonomiannya, yang bisa berguna untuk informasi dalam pengembangan daerah.
- Untuk digunakan pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah – masalah yang berhubungan dengan Pengelolaan fiskal Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sumber Daya Manusia

Menurut Sayuti Hasibuan (2000, p3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi (2003, p37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau

orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dll. Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Sistem Informasi

Sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Mengenai hirarki pengelompokkannya, dapat dikemukakan bahwa apabila suatu komponen di dalam suatu sistem membentuk sistem sendiri maka komponen ini dinamakan subsistem dan seterusnya sehingga akan ada nama-nama modul, submodul, aplikasi dan subaplikasi. Hirarki ini berlaku relatif, tergantung dari jenjang manajerial manakah dimulainya. Menurut Tata S, Analisis Sistem Informasi (2003 : 10) : “Sistem adalah setiap kumpulan dari komponen atau sub-sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas lingkup, tempat dan waktu-nya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Pengertian informasi dan data berlaku sangat relative tergantung pada posisinya terhadap lingkup permasalahannya. Jenis-jenis informasi dapat dipandang dari 3 segi yaitu manajerial, sumber dan rutinitasnya. Dari segi manajerialnya dibagi tiga jenis:

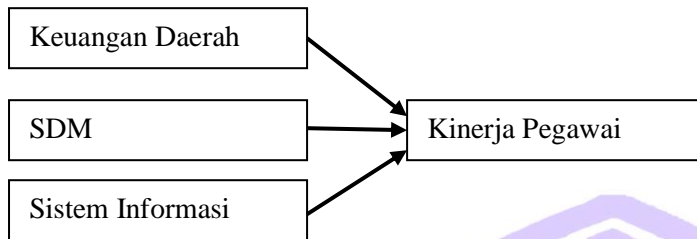
1. informasi strategis
2. informasi taktis
3. informasi operasional

Informasi strategis adalah informasi yang digunakan untuk kegiatan manajerial tingkat atas (top manajemen) dan umumnya mempunyai daya jangkau untuk waktu 5 sampai 15 tahun bahkan mungkin 75 tahun. Informasi taktis digunakan untuk manajerial tingkat menengah (middle manajemen) pada umumnya dengan daya jangkau satu tahun. Sedangkan informasi operasional adalah informasi yang digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat bawah (low manajerial) dan pada umumnya mempunyai daya jangkau dalam hitungan beberapa hari.

Informasi dilihat dari sumbernya dibagi menjadi dua jenis: internal dan eksternal. Informasi internal adalah informasi yang menggambarkan keadaan (profile), dan informasi eksternal adalah informasi yang menggambarkan ada tidaknya perubahan di luar organisasi itu. Informasi eksternal lebih banyak digunakan oleh kegiatan manajerial tingkat atas. Jenis informasi dibagi menjadi informasi insidental dan rutin. Informasi rutin digunakan secara periodik terjadwal dan digunakan untuk penanggulangan masalah-maslaah rutin. Informasi insidental diperlukan untuk penanggulangan masalah-masalah khusus.

Sistem Informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru.

Pengertian sistem informasi dapat dilihat dari segi fisik dan fungsinya. Dari segi fisiknya dapat diartikan susunan yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan tenaga pelaksananya yang secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan dari segi fungsi informasi merupakan suatu proses berurutan dimulai dari pengumpulan data dan diakhiri dengan komunikasi/desiminasi. Selanjutnya sistem informasi dikatakan berdaya guna jika mampu menghasilkan informasi yang baik, tinggi akurasinya, tepat waktu, lengkap dan ringkas isinya. Akurasi adalah ukuran berupa rasio antara jumlah informasi yang benar dan tidak benar. Suatu sistem dikatakan mempunyai akurasi tinggi apabila akurasinya sebesar 95%. Namun akurasi tinggi tidak akan berguna apabila kedatangannya terlambat dan tidak teratur. Oleh karena itu sistem informasi dituntut untuk lengkap, ringkas dan teratur sehingga tidak memusingkan pengguna informasi tersebut.

Kerangka Pemikiran**Grafik 1****METODE PENELITIAN****Jenis dan Sumber Data**

Data adalah keterangan yang diperlukan dalam penelitian atau dengan kata lain sebagai bahan informasi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk memperoleh data atau keterangan yang ada hubungan dengan penelitian ini maka digunakan data primer. Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber asli melalui wawancara tanpa perantara. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari instansi yang relevan yakni badan pengelola keuangan dan aset daerah Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data salah satu metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Moleong, 2000: 236). Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data kuantitatif yang berupa Belanja Daerah, Investasi swasta (PMDN dan PMA), dan Pertumbuhan ekonomi.

2. Metode Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara atau *interview* adalah konteks langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi (Maman Rahman, 1999). Metode wawancara akan digunakan untuk mencari data kualitatif yang berkaitan dengan upaya peningkatan alokasi Belanja Daerah, peningkatan Investasi swasta (PMDN dan PMA), dan Pertumbuhan ekonomi. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan pihak Kepala Sub Bid Pembukuan Kota Manado dan Kepala sub bid Pengendalian penanaman modal Provinsi Sulut secara langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikuto, 1998:33). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. SDM
2. Anggaran
3. Informasi
4. Kinerja perekonomian (Pertumbuhan Ekonomi)

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang

terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE). Jadi, tiap koefisien regresi yang ditaksir dengan menggunakan metode OLS bersifat linear dan tak bias secara rata-rata, penaksiran OLS memiliki varians yang mungkin paling kecil sedemikian rupa sehingga parameter yang sebenarnya dapat ditaksir secara lebih akurat dibanding dengan penaksiran tak bias lainnya. Singkatnya penaksiran OLS bersifat efisien.

Model ini digunakan untuk melihat pengaruh Keuangan daerah, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap kinerja pegawai di badan pengelola keuangan dan aset daerah Sulawesi utara. seluruh perhitungan dalam pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

Y_1 = Efektivitas Penerapan Anggaran

X_1 = Anggaran

X_2 = SDM

X_3 = Sistem Informasi

a = Kostanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi

e = standart eror

Uji Kesesuaian (Test of Goodness of fit)

Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t)

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. (Suliyanto.2011)

Untuk menghitung nilai t hitung digunakan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)} \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$t_{tabel} = n-k-1 \quad \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

β_1 = koefisien regresi variabel independen ke-i

Se = standar eror dari vaiabel independen ke-i

N = jumlah data

K = jumlah variable

Dalam pengujian ini mula-mula ditentukan hipotesis nol atau *null hypotesis* (H_0) yang menyatakan bahwa masing-masing variabel penjelas tidak berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan secara individu. Kemudian H_A yang menyatakan bahwa masing-masing variabel penjelas mempunyai pengaruh terhadap variabel yang menjelaskan secara individu.

Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut :

- a. Keuangan Daerah – Kinerja pegawai
 - $H_0 : \beta_i = 0$ tidak ada pengaruh antara Keuangan daerah dan kinerja Pegawai.
 - $H_1 : \beta_i \neq 0$ ada pengaruh positif Keuangan daerah dan kinerja Pegawai.
- b. SDM – Kinerja pegawai
 - $H_0 : \beta_i = 0$ tidak ada pengaruh antara SDM dan Kinerja pegawai.
 - $H_1 : \beta_i \neq 0$ ada pengaruh positif antara SDM dan Kinerja pegawai.
- c. Sistem Informasi – Kinerja Pegawai

- $H_0 : \beta_i = 0$ tidak ada pengaruh antara Sistem Informasi dan kinerja pegawai.
 $H_1 : \beta_i \neq 0$ ada pengaruh positif antara Sistem Informasi dan kinerja pegawai.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model (*goodness of fit*). Uji F ini juga sering disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan derajat kebebasan: df: α , (k-1), (n-k). Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus : (Suliyanto.2011)

Rumus nilai F hitung :

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(4)$$

- Dimana : F= Nilai F hitung
 R^2 = Koefisien determinasi
 N = Jumlah observasi
 K = Jumlah variable

Untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang di gunakan dalam model regresi secara serentak atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel yang dijelaskan, digunakan uji statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :

- $H_0 : \beta_i = 0$ semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas secara bersama-sama
 $H_1 : \beta_i \neq 0$ semua variabel atau minimal salah satu variabel berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersama-sama

Ket : Dimana β_i terdiri dari $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2} \dots\dots\dots(5)$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Uji Heteroskedasitas

Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linear klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Inilah yang disebut asumsi *heteroskedasticity* atau varian yang sama. Dalam heteroskedastisitas menunjukkan *disturbance* yang dapat ditunjukkan dengan adanya *conditional variance* Y_i bertambah pada waktu X bertambah. Dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil taksiran dapat menjadi kurang dari semestinya, melebihi dari semestinya dan menyesatkan.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas maka dapat dilakukan dengan menggunakan *White Test*. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas *Obs*R-squared*. Apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series* data)

atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional data*). (Sumodiningrat.2007) Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka dalam hal ini uji t dan uji F tidak lagi menjadi valid dan kurang kuat karena selang keyakinan akan semakin lebar. Autokorelasi mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan tidak efisien sehingga menjadi tidak dapat dilakukan. Pada penelitian ini digunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-Test* untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Apabila nilai Probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari taraf nyata tertentu (yang digunakan), maka persamaan ini dinyatakan tidak mengalami autokorelasi. Apabila nilai *Obs*R-squared* yang diperoleh lebih kecil dari pada taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut mengandung autokorelasi (Suliyanto.2011)

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan kaidah “auxiliary regression”. Penggunaan kaidah ini dilakukan dengan cara meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain. Apabila hasil dari proses meregres masing-masing variabel independen dengan variabel independen yang lain tersebut menunjukkan adanya nilai R² yang lebih rendah dari R² model utama, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja pada badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi Sulawesi Utara ialah sebagai berikut

Pengaruh secara langsung Variabel Independen Exogenus Keuangan daerah, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap Variabel dependen Endogenus Efektivitas Kinerja

Tabel 2 R-Square

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | R Square Change | F Change |
| 1 | .876 ^a | .767 | .758 | .15240 | .767 | 78,055 |

Sumber data : Pengolahan Data 2018

Dalam melihat pengaruh Variabel Independen Exogenus Keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sistem informasi secara gabungan terhadap variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 Model Summary diatas, pada nilai R square. Besarnya R square (R2) pada tabel diatas adalah 0,767. Angka tersebut mempunyai makna Besarnya pengaruh Variabel independen exogenous keuangan daerah, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap variabel dependen endogenus efektivitas kinerja secara gabungan. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus Keuangan daerah sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas kinerja secara gabungan adalah 76,7 %.

Yang berarti 23,3 % berarti besarnya faktor lain yang mempengaruhi diluar model yang di teliti. Artinya besarnya pengaruh variabel independen ekxogenus keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sistem informasi terhadap variabel dependen endogenus efektivitas kinerja adalah sebesar 76,7 %, sedangkan pengaruh sebesar 23,3 % disebabkan oleh variabel di luar model yang di teliti.

Tabel 3 Uji Beta

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | ,073 | ,250 | | ,292 | ,771 |
| 1 | | | | | |
| Keuangan Daerah | ,381 | ,036 | ,618 | 10,627 | ,000 |
| Sumber daya manusia | ,233 | ,033 | ,410 | 7,082 | ,000 |
| Sistem Informasi | ,362 | ,036 | ,582 | 10,026 | ,000 |

Sumber data : Pengolahan Data 2018

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Keuangan Daerah dan Variabel Dependen Endogenous Efektivitas kinerja

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenous keuangan daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas kinerja. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 75 - (3+1) = 71$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1.666 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Keuangan daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas kinerja ialah 10,627

Hipotesis :

H0 : Tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Keuangan Daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas kinerja.

H1 : Ada Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous keuangan daerah terhadap Variabel Dependen efektivitas kinerja.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan < 0,05 maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan > 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar 10,627 > t tabel sebesar 1.666. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenous Keuangan daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous Efektivitas kinerja. Maka Variabel Independen Exogenous keuangan daerah berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas kinerja.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenous keuangan daerah terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas kinerja diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,618 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig 0.000 < 0,05.

Pengaruh Variabel Independen Exogenous Sumber Daya Manusia dan Variabel Dependen Endogenous Efektivitas Kinerja.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenous Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenous efektivitas kinerja. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 75 - (3+1) = 71$. Dari ketentuan tersebut diperoleh t tabel sebesar 1.666 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk

menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja ialah 7,082

Hipotesis :

H0 : Tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja.

H1 : Ada Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen efektivitas kinerja.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan $< 0,05$ maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka $t \text{ hitung}$ sebesar $7,082 > t \text{ tabel}$ sebesar 1.666. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja. Maka Variabel Independen Exogenus sumber daya manusia berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas kinerja.

Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus sumber daya manusia terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas kinerja diketahui dari nilai Koefisien Beta (dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,410 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0.000 < 0,05$.

Pengaruh Variabel Independen Exogenus Sistem Informasi dan Variabel Dependen Endogenus Efektivitas Kinerja.

Untuk melihat apakah ada Pengaruh Linier Variabel Independen Exogenus Sistem Informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas kinerja. Dapat dilihat pada tabel Coefficients(a) Menentukan besarnya taraf Signifikan sebesar 0,05 dan Degree of Freedom $DF = n - (K+1)$ atau $DF = 75 - (3+1) = 71$. Dari ketentuan tersebut diperoleh $t \text{ tabel}$ sebesar 1.666 (untuk uji dua arah) Dalam perhitungan SPSS yang tertera pada tabel Coefficients di atas dimana tabel t adalah untuk menunjukkan bahwa adanya Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja ialah 7,082

Hipotesis :

H0 : Tidak ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja.

H1 : Ada Pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sistem informasi terhadap Variabel Dependen efektivitas kinerja.

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H0 ditolak, dan H1 diterima
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H0 diterima, dan H1 ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Jika Signifikan $< 0,05$ maka berpengaruh signifikan
2. Jika Signifikan $> 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan

Hasil dari perhitungan dengan SPSS menunjukkan angka $t \text{ hitung}$ sebesar $10,026 > t \text{ tabel}$ sebesar 1.666. Dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh linier antara Variabel Independen Exogenus Sistem Informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus Efektivitas kinerja. Maka Variabel Independen Exogenus Sistem Informasi berpengaruh terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas kinerja. Besarnya pengaruh Variabel Independen Exogenus Sistem informasi terhadap Variabel Dependen Endogenus efektivitas kinerja diketahui dari nilai Koefisien Beta

(dalam kolom Standardized Coefficients Beta) ialah 0,582 Signifikan karena nilai signifikansi / probabilitas hasil yang tertera pada kolom Sig $0.000 < 0,05$.

Pembahasan

Pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Sebagai implemetasi pelaksanaan penyelarasan anggaran dalam pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara memuat kebijakan kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Utara. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi *issue* yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Sulawesi Utara harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip *stewardship* dan *accountability*. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2). Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semula *open list* menjadi *close list*, Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat melakukan pembatalan Peraturan Daerah karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan tidak diatur dalam peraturan perundangan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

akan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (2)). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 67 telah ditetapkan bahwa Pemerintah daerah Provinsi dan Kab-kota wajib melaksanakan program strategis nasional. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah Provinsi dan Kab-Kota diwajibkan untuk mempedomani strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah nasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan dana disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dengan memperhatikan:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

3. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan terhadap pengaruh keuangan daerah, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja maka dapat dibahas beberapa hal. Yang pertama adalah keuangan daerah, keuangan menjadi salah satu faktor kunci bagi penerapan anggaran berbasis kinerja, dikarenakan dengan adanya anggaran yang memadai di dalam kas daerah untuk dikelola maka kemampuan pengelolaan dengan memanfaatkan keuangan yang ada di daerah guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi di daerah dapat dicapai, serta program-program unggulan dalam rangka memacu pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah dapat diakomodir. Hal ini menjadi salah satu gambaran bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja juga dapat dilaksanakan dengan tidak melupakan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh daerah.

Yang kedua adalah sumber daya manusia, dalam hal ini sumber daya manusia juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang dimiliki oleh pemerintah, dimana dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan mampu mengelola pelaksanaan penganggaran serta memaksimalkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas dalam pembangunan juga menjadi salah satu batu pijakan untuk meningkatkan kemampuan daerah serta menggenjot perekonomian yang ada. Walaupun demikian baik anggaran yang mencukupi maupun sumber daya manusia yang mumpuni kedua hal tersebut pada jaman keterbukaan informasi serta perputaran informasi yang cepat ini maka perlu juga didukung dengan adanya ketersediaan sistem informasi yang baik. Dengan adanya sistem informasi ini juga dapat menjadi salah satu ukuran berkembangnya suatu daerah atau tidak. Untuk itu keberadaannya juga tidak bisa dipisahkan dengan upaya pemerintah mendorong perekonomian yang dimiliki melalui anggaran dan sumber daya manusia yang handal. Dengan adanya sistem informasi yang memadai maka efektivitas kinerja yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang dimiliki juga penerapan anggaran yang dimiliki akan menjadi lebih baik dan lebih berkembang dikarenakan semakin banyak informasi serta masukan yang diterima dalam hal pengelolaan anggaran berbasis kinerja seperti yang dicanangkan pemerintah. Terlebih berdasarkan penghitungan yang dilakukan mendapatkan hasil yang positif baik dari secara bersama-sama keuangan, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap efektivitas kinerja penerapan anggaran berbasis kinerja, maupun secara parsial didapatkan hasil yang cukup positif dan signifikan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi (1998)**, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmad Yani. 2002**. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Halim. 2004**. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Arsyad, Lincolin. (1999)**. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.
- Adi, Priyo Hari, 2005**. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Kritis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Boediono, 1999**, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE
- Boediono, 1985**. Ekonomi Makro. Yogyakarta : BPFE
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004** Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gunawan Sumodiningrat. 2007**. Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia, Jakarta: Kompas
- Kartasasmita, Ginanjar 1996**, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004**, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000.** Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. USA.
- Moleong, Lexy J. 2000.** Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, 2002.** Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006.** Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Richardson, Harry W., 1991.** Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang, Jakarta, LPFE-UI.
- Rostow, W.W. 1960.** The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rachman, Maman. 1999.** Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Perss.
- Suryana. 2000.** Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat.
- Suliyanto. 2011.** Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI
- Sidik, Machfud, 2002,** Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah Disampaikan pada Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002.
- Sidik, Machfud, 2002a,** Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional: Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Yogyakarta, 20 April 2002.
- Saragih, Juli Panglima 2003.** Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetaakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2000.** Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPFEUI
- Tambunan, Tulus T.H. (2001),** Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro M.P. 2006.** Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Todaro. M.P., 2000.** Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Tulus T.H. 2004.** Globalisasi dan Perdagangan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
-
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah